

**ANALISIS PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN  
DAN BINA LINGKUNGAN DI PTPN 4  
PERIODE 2013-2017**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Manajemen (S.M)  
Pada Program Studi Manajemen*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**IRANTI PRATIWI SINULINGGA**

**NPM: 1505160679**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : **IRANTI PRATIWI SINULINGGA**  
N P M : **1505160679**  
Program Studi : **MANAJEMEN**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA-LINGKUNGAN DI PTPN 4 PERIODE 2013-2017**  
Dinyatakan : **(A)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

**H. MUIS FAUZI RAMBE, S.E., M.M**

Penguji II

**IRMA CHRISTIANA, S.E., M.M**

**Pembimbing**

**Dr. BAHRIL DATUK S, S.E., M.M**

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**H. JANURI, SE., MM., M.Si**



**Sekretaris**

**ADE GUNAWAN, SE., M.Si**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

**NAMA LENGKAP** : IRANTI PRATIWI SINULINGGA  
**N.P.M** : 1505160679  
**PROGRAM STUDI** : MANAJEMEN  
**KONSENTRASI** : MANAJEMEN KEUANGAN  
**JUDUL PENELITIAN** : ANALISIS PENYALURAN DANA PROGRAM  
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI PTPN 4  
PERIODE 2013-2017

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing

Dr. BAHRIL DATUK S, S.E., M.M

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Manajemen  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

JASMAN SYARIPUDDIN HSB, S.E, M.Si.

H. JANURI, SE, M.M, M.Si.



## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Iranti Pratiwi Simulingga  
NPM : 1505160679  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (~~Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi~~  
~~Pembangunan~~)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 26 Desember 2018

Pembuat Pernyataan



*Iranti Pratiwi*  
IRANTI PRATIWI S.

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jurusan / Prog.Studi : MANAJEMEN  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)  
  
Ketua Program Studi : JASMAN SYARIFUDDIN HSB, SE., M.Si  
Dosen Pembimbing : Dr. BAHRIL DATUK S, S.E., M.M  
  
Nama : IRANTI PRATIWI SINULINGGA  
NPM : 1505160679  
Program Studi : MANAJEMEN  
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI PTPN 4 PERIODE 2013-2017

Tgl	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
6-13-19	Scupornadan analisa dari efek ptas dan ke cektipitas sermas ke lancar, raji 2, unacet		
11-03-19	Se bju di pend ang han		Acc.

Dosen Pembimbing

Dr. BAHRIL DATUK S, S.E., M.M

Medan, Februari 2019  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Manajemen

JASMAN SYARIFUDDIN HSB, SE., M.Si

## **ABSTRAK**

### **Iranti Pratiwi Sinulingga (1505160679) Analisis Penyaluran Dana Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di PTPN 4 Periode 2013-2017**

Perusahaan wajib menyisihkan sebagian dari laba yang diperoleh untuk kegiatan CSR. Salah satu bentuk kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan adalah dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dana program kemitraan (PK) digunakan sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat melalui pinjaman lunak, sedangkan Bina Lingkungan (BL) digunakan sebagai pemberdaya kondisi sosial seperti bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, pelatihan kesehatan, sarana ibadah, sarana umum dan pelestarian alam.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana program kemitraan dan bina lingkungan di PTPN IV (Persero) Tbk. Periode 2013-2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai efektifitas program kemitraan berfluktuasi dimana terjadi peningkatan efektifitas program kemitraan yang disalurkan di tahun 2013 sebesar 63,83% dan kolektibilitas 71,73%, tahun 2014 efektifitas sebesar 73,01% dan kolektibilitas sebesar 70,49%, tahun 2015 efektifitas sebesar 40,01% dan kolektibilitas sebesar 70,18%, tahun 2016 efektifitas sebesar 93,60% dan kolektibilitas sebesar 70,12%, dan tahun 2017 efektifitas sebesar 94,40% dan kolektibilitas sebesar 70,10%. Terjadi penurunan yang drastis di tahun 2015 diakibatkan jumlah yang tersedia jauh lebih besar dari dana yang disalurkan. Sedangkan untuk program bina lingkungan tingkat efektifitas dana yang disalurkan pada tahun 2013-2017 berturut sebesar 93,87%, 97,23%, 59,01%, 92,64%, dan 99,81%.

**KataKunci : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh...

Alhamdulillah, Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT beserta junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang mana karena berkat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul: “**Analisis Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PTPN 4 Periode 2013-2017**”

Dalam menyelesaikan proposal ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Irwanta Sinulingga, S.E dan Ibu Fanti Mala Saragih yang selalu memberikan doa-doa yang mereka hanturkan disetiap langkahku.
2. Kakak Perempuan saya Irma Aprilyssa Putri Sinulingga Amd, serta Adik laki-laki saya Irfan Gading Sinulingga yang selalu memberikan dukungan dan bantuan positif baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan proposal ini.
3. Bapak Drs. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Wakil Dekan I & Bapak Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Jasman Syaripuddin Hsb S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Jufrizein S.E M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Bahril Datuk S. S.E, M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian proposal ini.
9. Seluruh staf Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yang ada di kelas H-Pagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dukungannya dan teman-teman stambuk 2015.
11. Kepada semua saudara sepupu saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
12. Kepada Raswan Irsyad, S.M yang selalu memberikan semangat agar penulis tidak pernah bosan untuk menyelesaikan proposal ini.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak memotivasi dan membantu selama ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi nantinya akan menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu, bantuan dan bimbingan dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dalam penyusunan proposal nantinya dapat bermanfaat bagi semua pihak. Mudah-mudahan penulis dapat menyelesaikan proposal tepat pada waktunya.

Medan,       Maret 2019

Iranti Pratiwi Sinulingga  
NPM: 1505160679

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Uraian Teori.....	12
1. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	12
a. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	12
b. Tujuan dan Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> . ..	14
c. Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	15
2. Program Kemiteraan Bina Lingkungan (PKBL) .....	17
a. Pengertian Program Kemiteraan Bina Lingkungan ....	17
b. Tujuan dan Manfaat PKBL.....	19
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi PKBL.....	20
d. Pengungkapan/Pengukuran PKBL.....	20
3. Kredit .....	22
a. Pengertian Kredit .....	22
b. Tujuan dan Manfaat Kredit.....	24
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian kredit .	25
d. Unsur-unsur Kredit .....	26
e. Pengukuran Kredit .....	26
B. Kerangka Berpikir .....	29
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Definisi Operasional Variabel .....	30
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
D. Sumber dan Jenis Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Teknik Analisis Data .....	32

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Latar Belakang PT Perkebunan Nusantara IV .....	33
	1. Sejarah Singkat PT Perkebunan Nusantara IV .....	33
	2. Visi dan Misi PT Perkebunan Nusantara IV .....	36
	3. Struktur Organisasi.....	36
	4. Deskripsi Pekerjaan.....	39
	B. Hasil Penelitian.....	47
	1. Program PKBL di PTPN IV .....	47
	2. Proses Pengajuan Program Kemitraan .....	55
	3. Tahapan Penerapan Program Bina Lingkungan.....	59
	4. Sumber Dana Program Kemitraan .....	60
	5. Tingkat Kolektibilitas.....	65
	6. Bidang Usaha dalam Program Kemitraan.....	70
	7. Sumber Dana Bina Lingkungan .....	72
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran.....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Persentase Kolektabilitas Macet.....	7
Tabel 1.2 Jumlah Mitra PKBL.....	8
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian .....	31
Tabel 4.1 Dana Tersedia dan Realisasi PK pada Efektifitas .....	62
Tabel 4.2 Tingkat Efektifitas dan Kolektibilitas.....	70
Tabel 4.3 Sektor Program Kemitraan .....	71
Tabel 4.4 Dana Tersedia dan Realisasi BL pada Efektifitas .....	73

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Jumlah Penyaluran dana .....	6
Gambar 1.2 Grafik Kolektabilitas Program Kemitraan.....	7
Gambar 1.3 Grafik Efektifitas Kinerja PKBL.....	8
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara IV .....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini perusahaan dituntut untuk dapat terus bersaing dan menerapkan strategi yang telah ditetapkan. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan aktivitas yang memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan tetapi memiliki dampak positif bagi masyarakat sebagian dari stakeholders. Perusahaan dan masyarakat adalah dua buah elemen yang saling terkait dalam menjalankan aktivitasnya dengan saling memberi dan membutuhkan. Salah satu dampak positif bagi perusahaan adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggung jawab organisasi dibidang hukum (Septiana, 2012)

Badan usaha milik negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang memiliki dua tanggung jawab, tanggung jawab yang bersifat ekonomis dan tanggung jawab yang bersifat sosial. Tanggung jawab yang bersifat ekonomis merupakan tanggung jawab BUMN kepada pemegang saham yang dititik beratkan pada kinerja keuangan dan pertambahan nilai perusahaan yang tergambar pada laporan keuangan perusahaan, sedangkan tanggung jawab yang bersifat sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilaksanakan oleh perusahaan merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya, investasi bagi perusahaan dan sekaligus sebagai komitmen dalam mendukung

terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (sustainability development) di lingkungan masyarakat sekitar. Namun ironisnya beberapa BUMN melaksanakan kegiatan CSR setelah terjadi konflik dengan masyarakat lokal, sebab masyarakat lokal selalu dirugikan oleh berbagai kegiatan perusahaan (Karlos, 2009). Sehingga untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengoperasian BUMN, sejak tahun 1989 pemerintah telah memulai sebuah program pemberdayaan masyarakat lokal dan usaha kecil.

Pada saat itu program ini dikenal dengan nama Pegelkop (pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada tahun 1994 berdasarkan SK menteri keuangan RI No.316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 nama program diganti menjadi program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, maka melalui Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 nama program diganti menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah dimana setiap BUMN harus menyisihkan 1-2 persen dari laba bersih untuk membantu usaha kecil dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha BUMN tersebut. Program PKBL terbagi menjadi dua, yaitu: program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.

Persepsi korporasi mengenai program CSR adalah tanggung jawab dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan perusahaan. Program kemitraan merupakan salah satu bagian dari CSR dengan

tujuan untuk kesejahteraan dan keberlanjutan perusahaan dengan memperoleh dukungan dari masyarakat (Nikmatullah, 2013).

Program Kemitraan (PK) disalurkan dalam bentuk pendampingan dan kredit lunak bagi UMKM yang belum bankable, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang bankable. Peraturan menteri negara BUMN No: Per/05/MBU/2007 menyatakan bahwa program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dan dari bagian BUMN. Dana program kemitraan digunakan sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat melalui pinjaman lunak, sedangkan Bina Lingkungan (BL) digunakan sebagai pemberdaya kondisi sosial seperti bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, pelatihan kesehatan, sarana ibadah, sarana umum dan pelestarian alam (Yulianti 2012).

Penelitian terdahulu bermanfaat sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Adpaun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Padmanisa dan Harahap (2013) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan: Studi Kasis PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2009-2011”. Hasil penelitian ini adalah Prosedur penerapan PKBL pada Bank Mandiri telah sesuai dengan PERMEN BUMN No. PER-05/MBU/2007. Sedangkan untuk kinerja PK yang diukur dengan efektifitas penyaluran dan efektifitas kolektibilitas piutang pinjaman memiliki nilai yang rendah. Penyaluran dana BL juga memiliki tingkat efektifitas yang rendah. Rendahnya tingkat kolektibilitas pinjaman dikarenakan Bank MAndiri memberikan pinjaman kepada usaha yang memiliki risiko yang tinggi, sedangkan rendahnya tingkat penyaluran dana PKBL

dikarenakan Bank Mandiri terlalu fokus pada bidang tertentu saja. Namun dari segi pelaporan keuangan PKBL, Bank Mandiri telah mengacu pada standar ketentuan yang berlaku.

Perusahaan melaksanakan program CSR dengan perhitungan yang matang, dimana besarnya dana yang disalurkan diperoleh dari penyisihan dana CSR (Putri, 2018). Tujuan program PKBL menjalin hubungan baik dengan masyarakat, membuang limbah perusahaan dengan metode yang benar dan tidak mencemari lingkungan sekitar dan memberikan bantuan pembangunan masjid kepada masyarakat dilingkungan sekitar. Adapun dalam bentuk ekonominya yaitu diwujudkan dari: Memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah, memberikan bantuan dana dalam bentuk proposal yang ditujukan masyarakat ke perusahaan (Kharisma, 2018).

Penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) akan menunjukkan kinerja yang efektif dilihat dari tiga indikator (proses, output dan outcome). Faktor yang mendukung efektif program ini yaitu: (1) proses pengajuan yang tidak menyulitkan, bunga atau fee yang terjangkau, (2) adanya motivasi dalam meningkatkan produktivitasnya karena adanya tambahan dana dari kredit PKBL, (3) dengan adanya kredit PKBL diberikan kesempatan untuk menambah produksi (Jas, 2015).

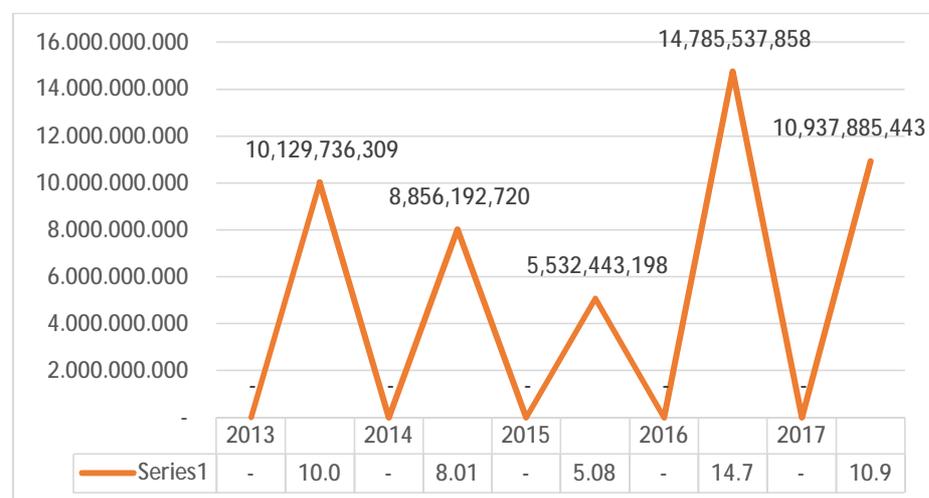
Program Kemitraan (PK) disalurkan dalam bentuk pendampingan dan kredit lunak bagi UMKM yang belum *bankable*, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang *bankable*. Peraturan menteri negara BUMN No: Per/05/MBU/2007 menyatakan bahwa program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan

mandiri melalui pemanfaatan dan dari bagian BUMN. Dana program kemitraan digunakan sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat melalui pinjaman lunak, sedangkan Bina Lingkungan (BL) digunakan sebagai pemberdaya kondisi sosial seperti bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, pelatihan kesehatan, sarana ibadah, sarana umum dan pelestarian alam (Yulianti, 2012).

Sejak tahun 1989 sampai tahun 2010, BUMN telah menyalurkan dana PKBL sebesar Rp 24.493 triliun untuk 33 provinsi dengan jumlah mitra binaan sebanyak 1.403.552 unit dari 141 BUMN. Penyaluran dana program kemitraan selama 2004-2009 diserap oleh sektor perdagangan 38 persen, sektor industri 22 persen, sektor jasa 19 persen, peternakan dan perikanan 10 persen, perkebunan dan pertanian 9 persen dan sektor lainnya sebesar 2 persen. Hal ini menunjukkan BUMN ikut berperan dalam memberikan bantuan modal dan pendampingan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah, lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. PKBL berpotensi besar untuk menjadi salah satu jembatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sulistyo dan Adiatma 2011).

PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang perkebunan yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dan merupakan perusahaan publik yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk memperoleh public support dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi perusahaan. Aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan ini berbentuk program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan terhadap masyarakat sekitar. PKBL

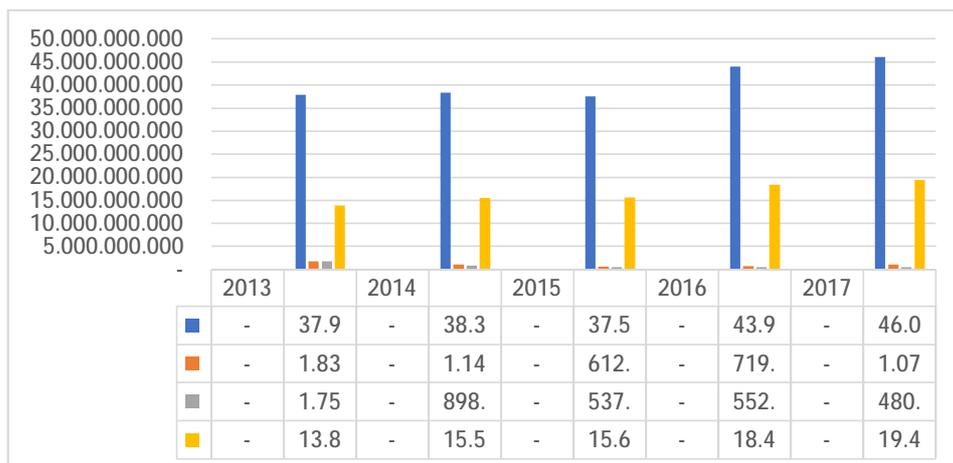
mendorong dunia bisnis khususnya PTPN IV, untuk menyisihkan keuntungan tahunan perusahaannya maksimal 2 persen untuk memberikan modal bagi pengembangan bisnis usaha kecil menengah, pendampingan, peningkatan kapasitasnya serta aktivitas monitoringnya terhadap mitra binaannya. Pada tahun 2013-2017 PTPN IV telah menyalurkan bantuan pinjaman modal kerja sebesar 6.136.880.500 untuk 1.729 unit mitra binaan. Berikut Tabel 1 yang menunjukkan realisasi penyaluran dana kredit PKBL PTPN IV (Persero) Tbk. pada tahun 2013-2017.



**Gambar 1.1 Grafik Jumlah Penyaluran Dana pada Program Kemitraan PTPN IV (Persero) Tbk. Tahun 2013-2017**

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas terlihat bahwa penyaluran dana PKBL berfluktuatif. Dana yang disalurkan mengalami penurunan dari tahun 2013-2015 dan naik signifikan pada tahun 2016 dan kembali menurun di tahun 2017.

Sedangkan dalam penyaluran berdasarkan kolektibilitasnya penyaluran dana program PKBL dapat terlihat seperti table di bawah ini:



**Gambar 1.2 Grafik Jumlah Penyaluran Dana Berdasarkan Kolektibilitasnya pada Program Kemitraan PTPN IV (Persero) Tbk. Tahun 2013-2017**

Grafik 1.2 di atas menggambarkan kolektibilitas penyaluran dana PKBL di PTPN IV(Persero) Tbk., dimana terlihat jumlah kolektibilitas lancar mengalami kenaikan di dua tahun pertama yaitu 2013-2014 dan menurun di tahun 2015 dan kembali naik di tahun-tahun selanjutnya. Akan tetapi, kategori kolektibilitas macet masuk dalam kategori tinggi dimana komposisi kolektibilitas macet masuk ke dalam kategori tinggi. Adapun persentase kolektibilitas macet dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Persentase Kolektibilitas Macet pada Program PKBL PTPN IV (Persero) Tbk. Tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah Kredit Macet	Total Dana Tersalur	Persentase
2013	Rp. 13.876.993.102	Rp. 55.385.970.095	25,06%
2014	Rp. 15.540.797.772	Rp. 55.931.209.852	27,79%
2015	Rp. 15.635.274.077	Rp. 54.304.706.708	28,79%
2016	Rp. 18.436.007.161	Rp. 63.706.791.441	28,94%
2017	RP. 19.429.124.065	Rp. 67.073.415.807	28,97%

Persentase kolektibilitas macet pada program PKBL pada PTPN IV (Persero) Tbk. mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2013 hingga 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa mitra PTPN IV (Persero) Tbk. mengalami penurunan kemampuan dalam pengembalian dana PKBL. Hal ini juga mengindikasinya terdapat penurunan kinerja dalam penyaluran dana PKBL.



Tabel di atas menggambarkan jumlah mitra yang berhasil menjalankan program kemitraan. Jumlah tertulis di atas tidak tetap setiap tahunnya. Pada tahun 2015 merupakan tahun dimana peserta program kemitraan paling rendah di banding tahun lainnya. Tingkat keberhasilan program kemitraan tergantung pada bagaimana mitra menjalankan usahanya. Sedangkan, mitra yang gagal menjalankan usahanya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya dan dibantu pembekalan untuk menjalankan usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "**Analisis Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PTPN IV (Persero) Tbk. Periode 2013 - 2017**".

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas diperoleh identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan persentase jumlah kolektibilitas kredit macet pada program PKBL tahun 2013 – 2017
2. Menurunnya kinerja dari program kemitraan yang disebabkan oleh target pengembalian dana yang tidak terpenuhi.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan indentifikasi masalah di atas, serta agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasannya sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini dibatasi hanya pada penyaluran dana program kemitraan dan bina lingkungan di PTPN IV (Persero) Tbk.pada tahun 2013-2017.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka berikut ini dirumuskan pertanyaan penelitian (rumusan masalah) ini sebagai :

1. Bagaimana system penyalurandanaprogram kemitraan dan bina lingkungan di PTPN IV (Persero) Tbk. Periode 2013-2017?
2. Bagaimana dana pada kolektibilitas macet dapat diminimalisasikan?

#### **E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui bagaimana penyaluran danaprogram kemitraan dan bina lingkungan di PTPN IV (Persero) Tbk. Periode 2013-2017.

##### **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi PTPN 4

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam rangka memberikan solusi efisiensi program PKBL di PTPN IV

2. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti tentang penyaluran danaProgram Kemitraan danBina Lingkungan

### 3. Bagi Penelitian Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang terkait dengan masalah penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PTPN IV (Persero) Tbk.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. *Corporate Social Responsibility (CSR)***

###### **a. Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)***

CSR sebagai sebuah konsep yang semakin populer belakangan ini, belum memiliki definisi yang tunggal, yang dapat diterapkan dalam sebuah perusahaan, namun ada beberapa definisi yang dapat di jadikan acuan dalam pengungkapan CSR.

- 1) *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai:

*“Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.”* Dalam bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah, komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

- 2) Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3) Menurut (Prastowo dan Huda 2011:17):

CSR adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk ‘membersihkan’ keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Dikatakan sebagai mekanisme alamiah karena CSR adalah konsekuensi dari dampak keputusan-keputusan ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka kewajiban perusahaan tersebut adalah membalikkan keadaan masyarakat yang mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik.

4) Definisi menurut ISO 26000:

*“Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship.”* Terjemahan bebasnya: (Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan; sejalan dengan hukum yang ditetapkan dengan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh).

Walupun perumusan ISO 26000 tidak berpretensi untuk menyediakan definisi tunggal, setidaknya kalangan korporasi dan stakeholder yang berkepentingan tentang CSR dapat menghargai jerih paya perumus ISO 26000 yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Sehingga, definisi CSR pada ISO 26000 ini setidaknya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menerapkan CSR dengan baik. Hal yang menarik, bahwa ISO 26000 menegaskan tanggung jawab sosial (social

responsibility/SR) tidak hanya berkaitan dengan perusahaan saja sebagaimana yang dikenal CSR selama ini. Tetapi, setiap organisasi yang memiliki dampak atas kebijakan-kebijakannya terutama terhadap lingkungan dan masyarakat, direkomendasikan untuk menjalankan CSR.

5) Definisi CSR menurut Simpson dan Taylor (2013) adalah:

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis yang secara keseluruhan menghasilkan dampak positif pada masyarakat.

Dari berbagai macam definisi di atas, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan dalam menaati peraturan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar baik dari segi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

**b. Tujuan Perusahaan Melakukan *Corporate Social Responsibility***

Menurut Resturiany (2012) menyebutkan bahwa:

“Tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberi manfaat yang terbaik bagi stakeholders dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan.

- 1) Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah: *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.
- 2) Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: *obey the law*. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
- 3) Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: *be ethical*.
- 4) Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: *be a*

*good citizen*. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *nonfiduciaryresponsibility*".

Keempat poin CSR ini perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Walaupun banyak yang menganggap bahwa laba yang harus diutamakan, karena laba merupakan cerminan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Namun, keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba tidak bisa dilakukan tanpa adanya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan taat terhadap hukum yang berlaku. Sebaiknya, kegiatan untuk menghasilkan laba dikaitkan dengan pengembangan masyarakat sekitar dan pembangunan yang berkelanjutan, karena masyarakat memegang peranan penting dalam keberlangsungan bisnis perusahaan. CSR bukan lagi hanya sekedar, kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan sejumlah dana, namun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR yang diatur dalam undang-undang pada setiap tahunnya.

### **c. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Informasi nonkeuangan dan keterlibatan sosial perusahaan dikomunikasikan kepada para stakeholder. Pengkomunikasian aktivitas tersebut dilakukan dengan berbagai cara dan media pengungkapan. Salah satu alat atau media yang dapat digunakan adalah laporan tahunan. Pengungkapan berarti penyampaian informasi. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social*

*disclosure, corporate social reporting, social accounting* atau *corporate social responsibility* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham.

Pertanggungjawaban sosial timbul jika organisasi memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap lingkungannya. Menurut Harahap (2011:407) Alasan agar perusahaan melakukan tanggung jawab sosial yaitu:

- 1) Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan perusahaan. Dalam jangka panjang hal ini sangat menguntungkan perusahaan.
- 2) Keterlibatan sosial mungkin akan mempengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat, yang mungkin akan menurunkan biaya produksi.
- 3) Meningkatkan nama baik perusahaan, akan menimbulkan simpati langganan, simpati karyawan, investor, dan lain-lain.
- 4) Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Campur tangan pemerintah cenderung membatasi peran perusahaan, sehingga jika perusahaan memiliki tanggung jawab sosial mungkin dapat menghindari pembatasan kegiatan perusahaan.
- 5) Dapat menunjukkan respons positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sehingga mendapat simpati masyarakat.
- 6) Sesuai dengan keinginan para pemegang saham, dalam hal ini publik.
- 7) Mengurangi tensi kebencian masyarakat kepada perusahaan yang kadang-kadang suatu kegiatan yang dibenci masyarakat tidak mungkin dihindari.
- 8) Membantu kepentingan nasional, seperti konservasi alam, pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat, lapangan kerja dan lain-lain.

Undang-undang perseroan terbatas yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan gambaran bahwa adanya dukungan pemerintah dalam penerapan CSR. Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 74:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dalam rangka mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

## **2. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)**

### **a. Pengertian Program Kemitraan Bina Lingkungan**

Salah satu penyaluran dana untuk membantu usaha mikro yang namun jarang digunakan di Indonesia adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL di mulai tahun 1994, dana PKBL adalah dana yang didapat dari penyisihan 1-2 persen laba badan usaha

milik negara (BUMN). Dana ini kemudian dibagi lagi kedalam dua jenis, yaitu: pinjaman dan pembinaan. Dalam pengolahan dana PKBL terdapat masalah-masalah yang ada di dalam penyalurannya banyak disalahgunakan oleh mereka yang ingin mencari dana dengan persyaratan yang relatif mudah.

Berdasarkan KEP2361MBU/2003 yang merupakan peraturan yang keluar dikarenakan peraturan sebelumnya belum dapat tercapai maka unit program kemitraan sekurangnya melakukan fungsi pembinaan, evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi, fungsi administrasi dan keuangan. Beberapa permasalahan yang ada, yaitu: sumber daya manusia, baik dalam masalah jumlah dan keahlian, biasanya pegawai BUMN yang ditetapkan di PKBL bukanlah orang perbankan yang memang keahliannya menganalisa prospek bisnis dan resiko pinjaman. Lebih jauh dengan tidak adanya peraturan yang jelas mengenai kepada siapa dana harus disalurkan maka yang terjadi adalah penyaluran pinjaman diberikan untuk berbagai bidang, padahal memberi pinjaman kepada sebuah sektor memiliki perlakuan yang berbeda dengan sektor lainnya.

Sedangkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 yang menjelaskan tentang pedoman penyusunan laporan keuangan PKBL dan menjelaskan pula tentang kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman modal usaha maupun pembelian perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadi Tangguh dan mandiri. Program

kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk pembiayaan, modal kerja, pinjaman khusus yang biasanya bersifat jangka pendek dan hibah untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi serta penelitian melalui pemanfaatan dana dari bagian dana BUMN (Pedoman Akuntansi PKBL)

#### **b. Tujuan dan Manfaat Program Kemitraan Bina Lingkungan**

Program Kemitraan (PK) adalah program yang diberikan dalam bentuk pinjaman (dana bergulir) untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan untuk usaha-usaha kecil menengah (UKM) atau mikro yang dibangun oleh masyarakat. Program kemitraan ini tentunya masuk terhadap unit-unit ekonomi skala mikro yang berusaha mengalokasikan sumberdaya ekonomi yang terbatas untuk mampu mengoptimalkan tingkat pemuasan kebutuhannya (Timah.com, 2015).

Tujuan Program Kemitraan antara lain:

- 1) Membantu Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) dan Koperasi yang sudah berjalan agar dapat berkembang dan mandiri.
- 2) Mendorong kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta terciptanya pemerataan pembangunan, melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.
- 3) Meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap pembinaan masyarakat dan lingkungan, terutama disekitar daerah operasional perusahaan.

Selain itu kelebihan dari PKBL sendiri adalah memberikan kredit dengan persyaratan yang mudah, memberikan pembinaan artinya setiap usaha yang meminjam dana ke PKBL dapat mengajukan permohonan pelatihan bila dirasa perlu untuk meningkatkan usahanya. Pinjaman yang diberikan berkisar dari 10 juta hingga 100 juta, bahkan ada beberapa BUMN besar yang memberikan hingga 200 juta. Rata-rata pinjaman adalah dua tahun dengan tingkat bunga 6 persen pertahun. Sebetulnya bunga ini sering disebut oleh para staff PKBL sebagai fee karena nilainya yang sebetulnya sangat rendah.

**c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Kemitraan Bina Lingkungan**

Menurut Yusuf (2009) Faktor pendorong dalam partisipasi dalam program kemitraan adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor pendorong dari Mitra Binaan  
Ada beberapa kondisi yang menumbuhkan partisipasi mitra binaan untuk terlibat dalam program kemitraan, baik sebelum ikut dalam program kemitraan dan saat ikut program kemitraan yaitu :
  - a) Mengembangkan usaha
  - b) Persyaratan mudah
  - c) Adanya manfaat yang didapat ketika mengikuti pembinaan dari program kemitraan ini.
- 2) Faktor pendorong dari Perusahaan  
Adapun factor pendorong dari perusahaan adalah sebagai berikut:
  - a) Pendekatan kepada masyarakat
  - b) Komunikasi yang baik dari petugas

**d. Pengungkapan/Pengukuran Program Kemitraan Bina Lingkungan**

Menurut peraturan PTPN IV kegiatan utama Program Kemitraan dan Bina lingkungan meliputi:

- 1) Program Kemitraan Badan usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil:

Menyalurkan dana program kemitraan dalam bentuk:

- a) Pinjaman untuk membiayai modal kerja atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan
  - b) Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan
  - c) Beban pembinaan
- 2) Program Bina Lingkungan

Memberikan bantuan untuk korban bencana alam, untuk pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan atau sarana umum, sarana ibadah, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengetasan kemiskinan.

Sedangkan berdasarkan pengungkapannya sumber dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV berasal dari:

- 1) Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pengesahan laporan tahunan BUMN Pembina untuk PKBL maksimum sebesar 4% dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya,
- 2) Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN
- 3) Saldo dana PKBL yang teralokasi sampai dengan tahun berjalan
- 4) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan

- 5) Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
- 6) Sumber lain yang sah.

### **3. Kredit**

#### **a. Pengertian Kredit**

Perkataan “kredit” berasal dari bahasa Latin *credo* yang berarti “saya percaya“, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanksekerta *cred* yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa Latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Memperoleh kredit artinya memperoleh kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantiannya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan menjelaskan sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (UU No. 10 tahun 1998). Adapun pengertian kredit menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

- 1) Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan

datang, karena penyerahan barang-barang sekarang. (Kent dalam Abdullah, 2012:163).

- 2) Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan pelaksanaan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati. (Hanafie, 2010:114).
- 3) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, dalam hal pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditentukan. (Hanafie, 2010:114).
- 4) Kredit adalah pemberian izin pemakaian suatu barang atau uang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan dan dengan pemberian jasa bunga atau tanpa bunga. (Astuty, 2015:206)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kredit adalah penyediaan uang dari pihak Bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain dimana pihak peminjam harus atau berkewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank.

## b. Tujuan dan Manfaat Kredit

Menurut Veithzal Rivai (2013:5) pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dengan kredit yaitu:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dalam bentuk bunga yang diterima dari nasabah.
- 2) *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu harus benar-benar terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan.

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan penting. Oleh karena itu organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek dan lain-lain. Hal ini disebabkan usaha pokok bank adalah mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi. Menurut Veithzal Rivai (2013:7), fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang/jasa oleh si penerima kredit.
- 2) Untuk meningkatkan utility (daya guna) suatu barang. Kredit yang diberikan oleh bank, digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna.
- 3) Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- 4) Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si

pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

- 5) Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi.  
Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit mampu membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
- 6) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.  
Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan
- 7) Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.  
Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika satu kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

### **c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian kredit**

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Menurut Veithzal Rivai (2013:4) unsur-unsur pemberian kredit adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur).
- 2) Adanya kepercayaan, yaitu sebuah kepercayaan dari si pemberi kredit (kreditur) kepada si penerima kredit (debitur).
- 3) Adanya persetujuan, yaitu berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar kepada si pemberi kredit (debitur).
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada si penerima kredit
- 5) Adanya unsur waktu. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit
- 6) Adanya unsur resiko. Baik dari pihak pemberi maupun dari pihak penerima. Resiko dari pihak pemberi adalah resiko gagal bayar, sedangkan dari pihak penerima adalah kecurangan.
- 7) Adanya unsur bunga sebagai kompensasi kepada si pemberi kredit.

#### **d. Unsur-Unsur Kredit**

Menurut Fahmi (2015) unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

- 1) **Kepercayaan**  
Kepercayaan merupakan sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitor maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik.
- 2) **Waktu**  
Waktu merupakan bagian yang sering dijadikan kajian oleh pihak analis finance khususnya oleh analis kredit. Hal ini dikarenakan pihak debitor saat menyerahkan uang kepada debitor harus memperhitungkan saat pembayaran kembali dilakukan
- 3) **Risiko**  
Risiko mengkaji pada saat terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbul kredit macet.
- 4) **Prestasi**  
Prestasi yang dimiliki kreditur untuk diberikan kepada debitor.
- 5) **Adanya kreditur**  
Dalam hal ini terkait dengan pihak yang memiliki uang, barang atau jasa dan berkomitmen kepada pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk bunga sebagai balas jasa uang.
- 6) **Adanya debitor**  
Dalam hal ini terkait dengan pihak yang memerlukan uang, barang atau jasa dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung semua risiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian.

#### **e. Pengukuran Kredit**

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Character*

Yaitu sifat atau watak seseorang dari calon debitur, seperti: cara hidup atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan sosialnya.

2) *Capacity*

Yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3) *Capital*

Yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri.

4) *Collateral*

Yaitu jaminan yang diberikan oleh nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5) *Condition*

Yaitu melihat atau menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil, kredit sebaiknya jangan diberikan terlebih dahulu atau jika diberikan sebaiknya melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

Sedangkan penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut:

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Hal ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

3) *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah seperti: untuk konsumtif atau tujuan produktif atau tujuan perdagangan.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) *Payment*

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6) *Profitability*

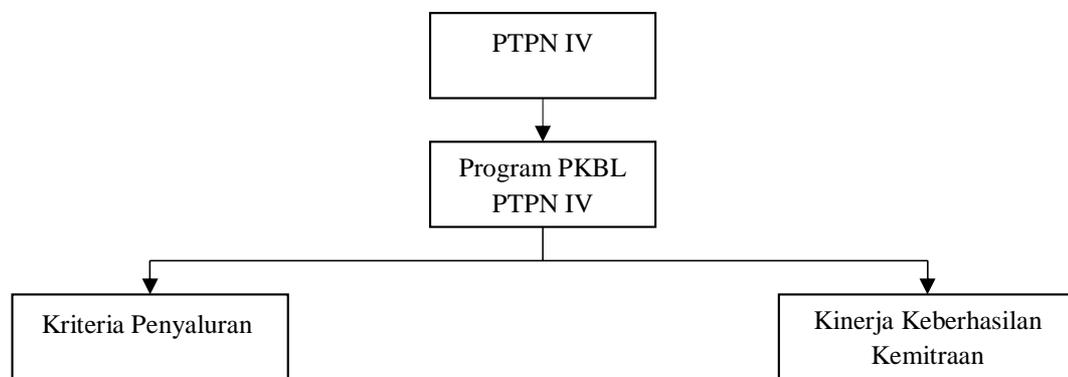
Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

### 7) *Protection*

Yaitu bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

## B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Diolah Penulis, 2018

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Rusiadi (2014:12), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan, menjabarkan, menganalisis objek penelitian sesuai dengan kebutuhan.

### **B. Definisi Operasional Variabel**

Adapun definisi operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### *1. Corporate Social Responsibility*

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis yang secara keseluruhan menghasilkan dampak positif pada masyarakat.

#### *2. Program Kemitraan Bina Lingkungan*

Program Kemitraan Bina Lingkungan adalah program yang diberikan dalam bentuk pinjaman (dana bergulir) untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan untuk usaha-usaha kecil menengah (UKM) atau mikro yang dibangun oleh masyarakat.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PTPN IV (Persero) di Jalan Letjend Suprpto No. 2, Hamdan, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2018, dan diperkirakan akan selesai pada bulan Maret.

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

No	Aktivitas	Bulan										
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■										
2	Penyusunan Proposal	■										
3	Seminar Proposal		■									
4	Perbaikan Acc Proposal		■									
5	Pengolahan Data			■								
6	Penyusunan skripsi			■								
7	Bimbingan skripsi				■							
8	Sidang Meja Hijau				■							

Sumber : Diolah Penulis, 2018

### D. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung ke lapangan baik melalui wawancara maupun observasi ke lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data nilai jumlah pembiayaan yang diterima mitra PTPN IV.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sinulingga (2016), ada 2 jenis data yang dapat digunakan di dalam suatu penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan di dalam penelitian ini, dimana teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu (Kuncoro, 2009). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

Wawancara (*interview*) kepada pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian ini, dan juga kepada sebagian responden guna memperdalam dan mempertajam hasil penelitian ini.

2. Data sekunder yaitu, data yang dikumpulkan tidak dari sumber-sumber asli, melainkan dikutip dari data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain (Umar, 2008). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi (studi dokumentasi) dan juga dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan (studi kepustakaan).

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis secara deskriptif dilakukan untuk menjelaskan gambaran umum mitra PKBL PTPN IV dan implementasi kinerja program PKBL. Analisis deskriptif dalam penelitian ini mendeskripsikan bagaimana program PKBL berjalan yang disesuaikan dengan prinsip pemberian kredit 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Latar Belakang PT Perkebunan Nusantara IV Medan**

##### **1. Sejarah Singkat PT Perkebunan Nusantara IV Medan**

PT Perkebunan Nusantara IV Medan beralamat di Jalan Letjend Suprpto No.2 Medan. Merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Agroindustri ini memiliki sejarah yang panjang sejak jaman belanda hingga jaman sekarang. Pada awalnya perkebunan ini merupakan milik dari sebuah maskapai belanda yang kemudian dinasionalisasikan pada tahun 1959 dan kemudian tahap selanjutnya berdasarkan kebijakan dari pemerintah saat itu yang telah mengalami beberapa kali perubahan organisasi, yang sebelum akhirnya menjadi PT Perkebunan Nusantara IV (Persero). Berikut tahapan sejarah singkat dari PT Perkebunan Nusantara IV Medan :

##### **1. Tahun 1959 (Tahap Nasionalisasi)**

Pada tahun 1959 ini berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No.19 perusahaan perusahaan asing milik belanda seperti NV.HVA (Namblodse Venotschaaf Handels Vereeniging Amsterdam) dan NVRCMA (Namblosde venotschaaf Rubber Cultur Maatschappij Amsterdam) dinasionalisasikan dan kemudian dilebur menjadi perusahaan milik pemerintah.

##### **2. Tahun 1967 (Tahap Regrouping I)**

Tahun 1967-1968 selanjutnya pemerintah melakukan regrouping menjadi Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Aneka tanaman, PPN Karet dan PPN serat.

3. Tahun 1971 (Tahap Perubahan Menjadi Perusahaan Negara Perkebunan)  
Dengan dasar peraturan pemerintah No. 144 tahun 1968, Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) yang ada di Sumut dan Aceh di regrouping ulang menjadi PNP I s/d IX.
4. Tahun 1971 (Tahap Perubahan Menjadi Perusahaan Perseroan)  
Dengan dasar peraturan pemerintah tahun 1971 dan tahun 1972, Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) dialihkan menjadi perusahaan terbatas persero dengan nama resmi PT Perkebunan I s/d IX (Persero).
5. Tahun 1996 (Tahap Peleburan Menjadi PTPN)  
Berdasarkan peraturan pemerintah pada tahun 1996, semua PTP yang ada di Indonesia di regrouping kembali dan dilebur menjadi PTPN I s/d XIV dan PT. Perkebunan Nusantara IV dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang peleburan perusahaan perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan perseroan (Persero) PT perkebunan VII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII menjadi perusahaan perseroan (Persero) PT perkebunan Nusantara IV.

PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) didirikan di Bah Jambi, Simalungun, Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan akta pendirian No.37 dari Harun Kamil, S.H notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan

No.C2-8332.HT.01.01 Thn. 1996 dan telah diumumkan dalam berita negara republik indonesia No.81 Tanggal 8 oktober 1996, Tambahan No. 9675/1996 serta telah didaftarkan pada kantor pendaftaran perusahaan tingkat I sumatera utara c.q Dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten simalungun No. 001/BH.2.15/1996 tanggal 16 september 1996 dan telah diperbaharui dengan No.07/BH/0215/VIII/01 TANGGAL 23 Agustus 2001.

Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa setiap Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial Dan lingkungan yang harus dianggarkan (dibiayakan). Untuk memenuhi peraturan – peraturan tersebut maka PT Perkebunan Nusantara IV membentuk PKBL sebagai bentuk pertanggungjawaban akan kesejahteraan sosial dan keseimbangan lingkungan disekitar unit usaha PT Perkebunan Nusantara IV.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah program pemberian pinjaman modal yang diberikan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mengembangkan usahanya Dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat yang berada di wilayah PTPN IV melalui pemanfaatan sebagian laba PTPN IV. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dipimpin oleh Bapak Drs. H. R. Triawarman.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan memiliki tiga kegiatan yaitu Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Besarnya alokasi dana Program Kemitraan dan Program

Bina Lingkungan yang dianggarkan ditetapkan oleh RUPS sementara dana Program CSR langsung dari perusahaan.

## **2. Visi dan Misi PT Perkebunan Nusantara IV**

### **a. Visi PT Perkebunan Nusantara IV**

Visi dari PT Perkebunan Nusantara IV Medan adalah untuk menjadi pusat keunggulan pengelolaan perusahaan agroindustri kelapa sawit dengan tata kelola perusahaan yang baik serta berwawasan lingkungan.

### **b. Misi PT Perkebunan Nusantara IV**

Misi dari PT Perkebunan Nusantara IV Medan adalah sebagai berikut:

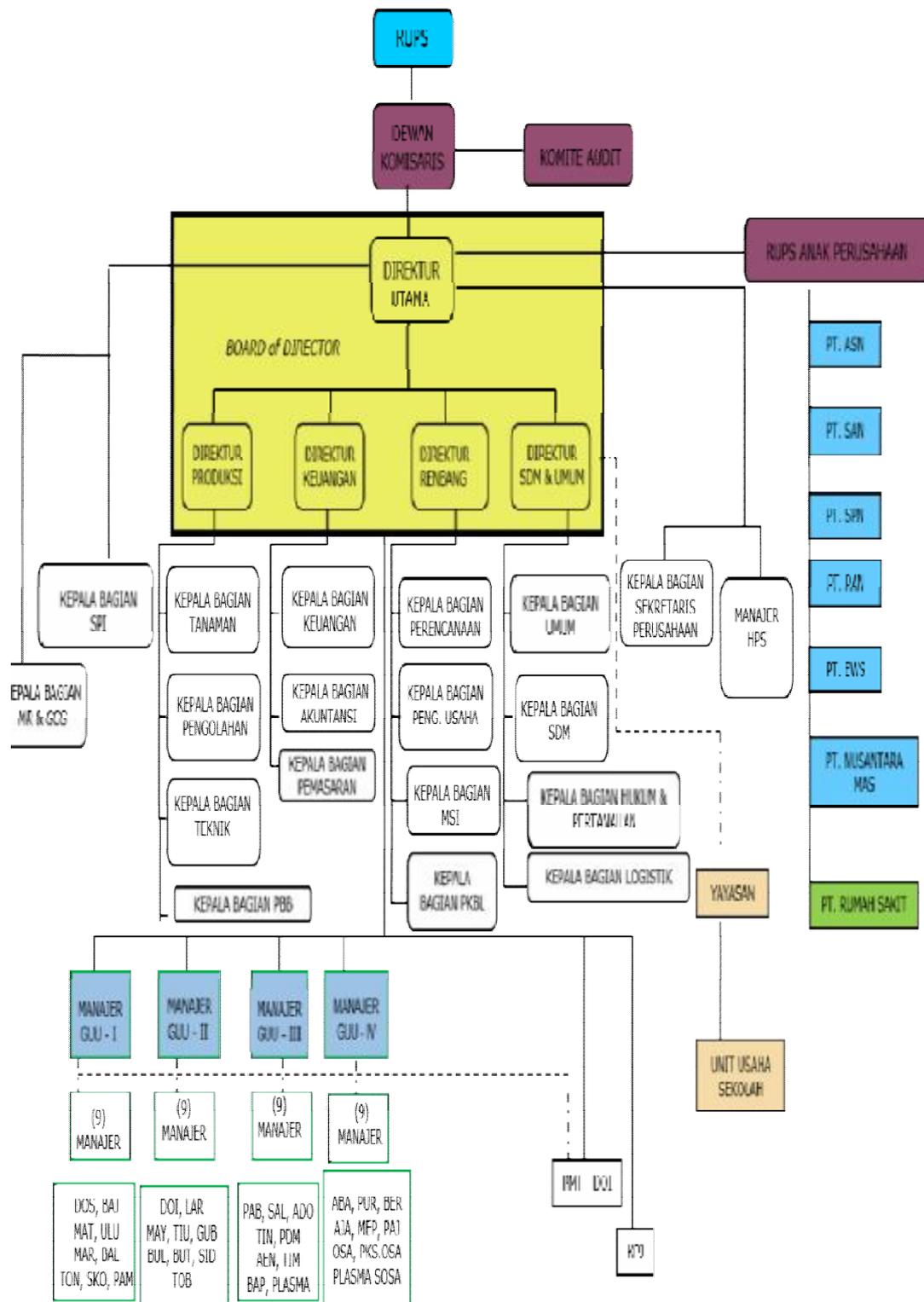
- 1) Menjamin keberlanjutan usaha yang kompetitif, meningkatkan daya saing produk secara berkesinambungan dengan sistem, cara dan lingkungan kerja yang mendorong munculnya kreatifitas dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan efesiensi
- 2) Meningkatkan laba secara profesional
- 3) Mengelola usaha secara profesional, untuk meningkatkan nilai perusahaan yang mempedomani etika bisnis dan tata perusahaan yang baik.
- 4) Meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 5) Melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah pusat / daerah

## **3. Struktur Organisasi**

Suatu organisasi diperlukan perusahaan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya

hubungan dan keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktifitas maupun kegiatan instansi tersebut pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan tata hubungan secara vertikal, melalui saluran tunggal. Berikut merupakan Struktur Organisasi PTPN IV Medan dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini :



**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara IV Medan**

Sumber : PT Perkebunan Nusantara IV Medan

#### **4. Deskripsi Pekerjaan (Job Description)**

Adapun deskripsi pekerjaan PT Perkebunan Nusantara IV adalah sebagai berikut:

##### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan anggaran dasar. RUPS dalam kegiatannya mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Merupakan forum utama dimana para pemegang saham dapat menggunakan hak otoritasnya pada manajemen perseroan.
- b. Forum ini juga merupakan otoritas tertinggi dimana sejumlah resolusi penting diputuskan dan disarankan untuk kemudian menjadi kebijakan resmi perusahaan.
- c. Forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memiliki kekuasaan untuk memilih komisaris dan direksi.
- d. Menentukan jumlah kompensasi para komisaris dan direksi serta menilai kinerja perseroan selama beberapa tahun finansial melalui sejumlah evaluasi dan memutuskan pengguna keuntungan perusahaan.

##### **2. Dewan Komisaris**

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran

Dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris dalam kegiatannya mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam melaksanakan kepengurusan perseroan serta memberi nasihat kepada direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut komisaris harus patuh kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS.
- c. Bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha perseroan dan bertanggung jawab kepada perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh RUPS.
- d. Para anggota komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri setiap saat berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa atau memastikan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan direksi.
- e. Jika dianggap perlu, komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban perseroan.

- f. Para anggota komisaris berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal kepada direksi dan direksi wajib memberikan penjelasan.
- g. Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan
- h. Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota direksi dan jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendasar bagi perseroan.
- i. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- j. Dalam waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, komisaris diwajibkan untuk memanggil RUPS yang akan memutuskan apakah anggota direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya. Sedangkan yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.
- k. Jika RUPS tidak menindaklanjuti keputusan tersebut maka dalam waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, pemberhentian sementara dianggap gagal.

### 3. Dewan Direksi

Direksi bertugas memimpin dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan tentang segala kejadian tentang pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. Dalam melaksanakan tugasnya direksi memiliki wewenang, antara lain menetapkan kebijakan kepengurusan perusahaan. Namun direksi juga memiliki kewajiban yaitu mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan usahanya. Masing-masing anggota direksi memiliki tugas yang lebih spesifik, yaitu :

a. Direktur Utama

Direktur Utama dalam dalam kegiatannya mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan proses manajemen transformasi dalam rangka terwujudnya *Sustainable Value* dan *Sustainable Growth*.
- 2) Membangun pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi secara efektif.
- 3) Mensukseskan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu 9001:2000 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)
- 4) Melaksanakan seluruh peraturan yang berlaku terhadap operasional perusahaan dalam rangka memenuhi kepatuhan (etika bisnis dan kerja)

- 5) Mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan pada RUPS.
  - 6) Mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip manajemen yang selaras.
  - 7) Menetapkan Anggaran Belanja Tahunan dan Program Kerja Bulanan dari Perusahaan.
  - 8) Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh *Engineering Director*, *Agricultur Director*, dan *Finance* serta *Administration Director*.
  - 9) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan segala aspek kehidupan perusahaan kepada dewan komisaris.
- b. Direktur Produksi

Direktur Produksi dalam kegiatannya mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Menetapkan upaya strategi dan kebijakan bidang produksi serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- 2) Mengevaluasi dan menyempurnakan proses bisnis bidang produksi untuk mewujudkan *Best Practices*.
- 3) Mengendalikan biaya produksi serta investasi sarana/prasarana produksi pada tingkat efektif dan efisien.
- 4) Mengimplementasikan dan mereview pelaksanaan inovasi di bidang produksi.
- 5) Menterjemahkan kebutuhan pasar menjadi pelaksanaan operasional di bidang produksi.

6) Mengimplementasikan dan mereview pelaksanaan Sistem Penilaian Kerja (SPK) bagi SDM Bidang Produksi.

7) Melaksanakan seluruh program

c. Direktur Keuangan

Direktur keuangan dalam kegiatannya mempunyai beberapa tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Menetapkan upaya strategi dan kebijakan bidang keuangan/akuntansi/pemasaran dalam perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

2) Mengevaluasi dan mengumpulkan proses bisnis (*work system*) bidang keuangan/akuntansi/pemasaran untuk mewujudkan *the best total cost*

3) Memelihara keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan

4) Mengimplementasikan dan mereview pelaksanaan *assets management* secara kesinambungan untuk menghindari erosi kapital

5) Memelihara *cash reserve requirement* sebesar 2 bulan kebutuhan dana operasional

6) Menyediakan sumber dana bagi pengembangan perusahaan dan kebun masyarakat disekitar unit kebun

7) Mengimplementasikan dan mereview pelaksanaan sistem penilaian kerja (SPK) bagi SDM keuangan/ akuntansi/ pemasaran

8) Melaksanakan seluruh program

d. Direktur perencanaan dan pengembangan usaha

Direktur perencanaan dan pengembangan usaha dalam kegiatannya mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Menetapkan upaya strategi jitu serta kebijakan – kebijakan dalam bidang perencanaan dan pengembangan usaha serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- 2) Mengevaluasi dan menyempurnakan proses bisnis bidang perencanaan dan pengembangan usaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan pemasok.
- 3) Mengembangkan dan membina hubungan dengan mitra bisnis serta mitra aliansi
- 4) Mengimplementasikan dan mereview pelaksanaan sistem perencanaan dan pengembangan usaha
- 5) Menghimpun dan mensiasati perkembangan pasar dan perilaku pesaing (*market intelegene*)
- 6) Mengimplementasikan dan mereview pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat lingkungan sekitar unit kerja melalui program PKBL dan CSR
- 7) Menginformasikan kebutuhan pasar secara berkesinambungan kepada direktur produksi
- 8) Membangun sistem aliansi dalam pengembangan portopolio bisnis dan diversifikasi usaha

- 9) Mengendalikan biaya bidang perencanaan dan pengembangan usaha pada tingkat yang efektif dan efisien
  - 10) Mengimplementasikan dan mereview pelaksanaan sistem penilaian kerja (SPK) dari SDM bidang perencanaan dan pengembangan usaha
- e. Direktur SDM dan Umum

Direktur SDM dan Umum dalam kegiatannya mempunyai beberapa tugas serta wewenang yang harus dilaksanakan dalam perusahaan sebagai berikut :

- 1) Menerapkan upaya strategi dan kewajiban SDM dan Umum serta mengevaluasi pelaksanaannya
- 2) Mengevaluasi dan menyempurnakan proses bisnis bidang umum untuk mewujudkan keamanan lingkungan kerja dan pemenuhan aspek legalitas.
- 3) Mengimplementasikan dan mereview pelaksanaan dan pelatihan yang didasarkan atas hasil *mapping personil* dan kompetensi profil jabatan serta mengevaluasi pelaksanaannya
- 4) Mengendalikan biaya pembinaan SDM dan Umum secara efektif dan efisien
- 5) Mengimplementasikan dan mereview pelaksanaan sistem penilaian kerja (SPK) bagi SDM dan Umum
- 6) Mengembangkan sistem mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan serta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

## B. Hasil Penelitian

### 1. Program PKBL di PTPN IV Medan

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian dengan melakukan studi dokumenter yang berhubungan langsung dengan materi yang diteliti, diperoleh data sebagai berikut:

- a. Dasar dan acuan penerapan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan di PT. Perkebunan NusantaraIV Medan

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan di PT. Perkebunan NusantaraIV Medan diterapkan dengan mengikuti ketentuan *Standard Operating Prosedure* (SOP) Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang dibuat oleh Divisi Komunikasi Perusahaan PT. Perkebunan NusantaraIV Medan.. SOP PKBL dikeluarkan karena adanya perintah Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan NusantaraIV Medanagar dibuat SOP PKBL. Berdasarkan konsideran, SOP PKBL tersebut disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta peraturan Internal PTPN IV MEDAN. Maksud dan tujuan dari penerapan Program Kemitraan menurut SOP PKBL yang dikeluarkan oleh PTPN IV MEDAN adalah mendorong upaya pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan dan

pemberdayaan masyarakat serta berpartisipasi aktif pembinaan kepada usaha kecil berupa bantuan modal usaha, promosi produk usaha, pendampingan mitra binaan dan pelatihan/pendidikan melalui Program Kemitraan. SOP PKBL dipedomani dalam menerapkan PKBL di unit operasional dan untuk hal-hal yang tidak diatur secara khusus tetap mengacu kepada peraturan PT. Perkebunan NusantaraIV Medanyang berlaku

- b. Terminologi dalam PKBL di PT. Perkebunan NusantaraIV Medan
- Terminologi yang digunakan dalam penerapan PKBL di PT. Perkebunan NusantaraIV Medan bersumber dari *Standard Operating Procedure* (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. SOP PKBL ditujukan kepada segenap Kantor PT. Perkebunan NusantaraIV Medan, sehingga SOP PKBL ini berlaku di PT. Perkebunan NusantaraIV Medan. SOP ini dibuat dengan tujuan menindak lanjuti program pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN dalam hal kewajiban Persero BUMN melaksanakan PKBL, juga dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat. Dalam SOP PKBL disebutkan terminologi yang dipakai dalam penerapan PKBL di PT. Perkebunan NusantaraIV Medan, yaitu:

- 1) *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah sistem dan prosedur pelaksanaan PKBL yang berlaku di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

- 2) Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
- 3) Menteri adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- 4) Perusahaan adalah PT. Perkebunan NusantaraIV Medan
- 5) Kantor Besar adalah Kantor Pusat PT. Perkebunan NusantaraIV Medan Kantor Cabang adalah Kantor Cabang dan atau Sentra Kredit Kecil dan atau Cabang *Stand Alone* (STA) PT. Perkebunan NusantaraIV Medan.
- 6) Direktur Utama adalah Direktur Utama PT. Perkebunan NusantaraIV Medan dan bertindak sekaligus sebagai pembina PKBL PT. Perkebunan NusantaraIV Medan
- 7) Direksi adalah Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.
- 8) Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil/usaha perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih setinggi-tingginya Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 9) PKBL adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- 10) Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan

mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- 11) Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah usaha PT. Perkebunan Nusantara IV Medan melalui pemanfaatan bagian laba perusahaan yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 12) Program Bina Lingkungan BUMN Peduli adalah Program Bina Lingkungan yang dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri.
- 13) Mitra Binaan adalah Pelaku usaha kecil (usaha mikro, kecil dan koperasi) yang mendapatkan fasilitas pinjaman dari dana Program Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.
- 14) BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
- 15) Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu propinsi tertentu.
- 16) BUMN Penyalur adalah BUMN yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyalur.

- 17) Lembaga Penyalur adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyalur.
- 18) Kredit Kemitraan BUMN di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan adalah pelaksanaan Program Kemitraan di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.
- 19) Pinjaman Khusus adalah pinjaman kepada mitra binaan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan mitra binaan untuk usaha produktif.
- 20) Beban Pembinaan adalah beban biaya kegiatan bimbingan dana pendampingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan.
- 21) Beban Operasional adalah beban biaya pelaksanaan operasional yang berhubungan dengan kegiatan PKBL.
- 22) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 23) Lembaga Pendamping adalah merupakan instansi/institusi /lembaga/perusahaan/yayasan/koperasi yang mempunyai fungsi

sebagai pembina, pendamping, rekomendasi dan konsultasi Program BL.

24) Kelompok PKBL adalah unit khusus di dalam Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang mengelola dana Program Kemitraan maupun Program Bina Lingkungan.

25) *Capacity Building* adalah pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mitra binaan dalam bidang administrasi, kualitas produk dan pemasaran. *Capacity Building* juga digunakan untuk meningkatkan kemampuan petugas PKBL di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

26) Program unggulan PKBL PT. Perkebunan Nusantara IV Medan untuk pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sosialnya dalam suatu kawasan (cluster).

27) Kualitas Pinjaman Kredit PTPN IV MEDAN Mitra Binaan adalah suatu status kondisi pinjaman mitra binaan yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet.

28) Kualitas Pinjaman Kredit PTPN IV MEDAN adalah status kondisi portepel pinjaman pada PTPN IV MEDAN yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman dengan perhatian khusus, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet.

- 29) Pemulihan Pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki kualitas pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya.
- 30) *Dropping* Dana adalah proses alokasi dana PKBL dari KMP kepada unit operasional.
- 31) Pengembalian *dropping* adalah pengembalian sisa *dropping* dana kemitraan yang masih tersisa di unit operasional ke giro KMP.
- c. Divisi yang terlibat dalam PKBL di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Ada tujuh divisi yang terlibat dalam penerapan PKBL di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dan berlaku di semua unit PTPN IV MEDAN di seluruh Indonesia, berikut divisi yang terlibat dalam penerapan PKBL tersebut:

- 1) Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan (KMP)

Divisi KMP berperan sebagai yang melakukan seleksi, penilaian dan persetujuan atas usulan maupun proposal yang masuk dari unit operasional dan pihak eksternal; melakukan *dropping* dana PKBL ke unit operasional; melakukan promosi dan publikasi terkait PKBL; melakukan sinergi dengan BUMN lain maupun instansi lain dalam terhadap penyaluran PKBL; melakukan kerjasama dengan instansi sebagai lembaga penyalur maupun lembaga pendamping untuk membantu kegiatan PKBL lainnya; melakukan perencanaan, pengelolaan serta monitoring PKBL secara berkesinambungan dengan melibatkan unit yang ada di

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan maupun pihak eksternal; melaksanakan fungsi akuntansi, administrasi dan pelaporan kegiatan PKBL; menyusun dan memperbaiki juklak PKBL bersama unit terkait.

2) Divisi Usaha Kecil (USK)

Divisi USK berperan mengatur memutus kredit untuk Program Kemitraan; menunjuk PIC PKBL di SKC; dan menetapkan target Program Kemitraan bersama KMP.

3) Divisi Jaringan dan Layanan (JAL)

Divisi JAL berperan mengatur kewenangan memutus kredit untuk Program Kemitraan dan menunjuk PIC PKBL di STA.

4) Divisi Pengendalian Keuangan (PKU)

5) Divisi Teknologi (TEK)

6) Kantor Wilayah.

Kantor wilayah berwenang memberikan usulan kegiatan terkait PKBL di wilayah kerjanya; menyampaikan rencana kerja dan anggaran terkait PKBL di wilayah kerjanya; mendukung PKBL KMP saat melaksanakan tugas di wilayah kerjanya; melakukan monitoring terhadap semua pelaksanaan kegiatan PKBL termasuk Kampoeng PTPN IV MEDAN yang berada di wilayah kerjanya; mengkoordinasikan seluruh permintaan Program Bina Lingkungan dari unit operasional di wilayah kerjanya dan menyampaikan ke KMP; menunjuk PIC PKBL di

kantor wilayah; menyampaikan laporan kinerja dan aktivitas PKBL di wilayah kerjanya kepada KMP.

7) Unit Operasional (Divisi/Unit/Kantor Cabang/SKC/STA)

Unit Operasional bertugas menerima dan mempertanggungjawabkan dana PKBL sesuai ketentuan yang berlaku; melakukan penyaluran kredit kemitraan melalui analisa kredit kemitraan sesuai ketentuan yang berlaku; menerima, melakukan proses dan memutus kredit kemitraan sesuai dengan matrik kewenangan kredit yang berlaku; mengelola dan memanfaatkan alokasi jasa administrasi kredit kemitraan di unitnya sesuai ketentuan terlampir tentang beban operasional; melakukan identifikasi, perencanaan dan pengembangan PKBLPTPN IV MEDAN sesuai dengan produk unggulan daerahnya; berperan aktif dalam melakukan kegiatan Bina Lingkungan (sosial) di sekitarnya dengan tujuan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan citra positif PTPN IV MEDAN; melaporkan kinerja dan aktivitas terkait PKBL kepada kantor wilayah; menjaga kualitas dan monitoring kredit kemitraan kepada mitra binaan.

## **2. Proses Pengajuan Program Kemitraan**

Berdasarkan hasil wawancara, sebagai data pendukung didapat data mengenai proses pengajuan dan penyaluran Kredit Kemitraan BUMN (KKB) yang dilakukan oleh PT. Perkebunan NusantaraIV Medan.

Tahapan dalam penyaluran KKB ini adalah pertama, pengajuan KKB dapat dilakukan secara langsung oleh pribadi/orang-perorangan ataupun melalui lembaga/instansi yang memiliki mitra binaan dengan melengkapi persyaratan untuk KKB, yakni:

- a. Pasfoto pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar (suami/istri)
- b. Fotocopi KTP yang masih berlaku (suami/istri)
- c. Fotocopi Kartu Keluarga pemohon
- d. Foto usaha sebanyak 2 lembar ukuran 5 inchi
- e. Fotocopi SITU, SIUP, TDUP, NPWP dan atau minimal surat keterangan usaha dari lurah setempat
- f. Fotocopi buku tabungan/rekening bank yang masih berlaku
- g. Fotocopi agunan yang akan dijaminkan
- h. Sertifikat Hak Milik
- i. Denah lokasi usaha
- j. Surat pernyataan (bermaterai) tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN Pembina lain
- k. Surat Permohonan (bermaterai)

Setelah persyaratan dilengkapi barulah memasuki tahapan kedua, yakni survey dan verifikasi awal. Pihak PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang diwakili oleh *credit analist* melakukan survey dan verifikasi awal mengenai data-data yang disampaikan calon mitra binaan agar dapat dikaji kelayakan pemberian penyaluran dana KKB. Jumlah *credit analist* PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Pada tahapan ini seorang *credit analist* melihat kecocokan data-data yang disampaikan calon mitra binaan dengan

fakta di lapangan. Tahapan yang ketiga adalah analisa data, tujuan dilakukannya tahapan ini adalah untuk mengetahui dapat atau tidaknya calon mitra binaan diberikan/dialurkan dana KKB dan jika diberikan kredit apakah calon mitra binaan dapat mengembalikan dana yang telah diberikan dengan tepat waktu. Tahapan ini dilakukan dengan menganalisa tentang kemampuan membayar (*repayment capacity*) mitra binaan/nasabah yang dapat dilihat dari progress dan keadaan tiga tahun ke belakang usaha calon mitra binaan. Dalam tahap ketiga ini, apabila hasil analisa data ini menyatakan bahwa usulan calon mitra binaan disetujui, maka dituangkan ke dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) dan diserahkan kepada wakil pimpinan PT. Perkebunan NusantaraIV Medan untuk proses persetujuan.

Perlu diketahui untuk menerima proposal kredit kemitraan BUMN, PT. Perkebunan NusantaraIV Medanpun harus yakin bahwa calon mitra binaan dapat dipercaya menggunakan dana Program Kemitraan. Yakin tidaknya dapat dilihat dari *repayment capacity* calon mitra binaan dan manajemen usahanya. Setelah disetujui oleh Wakil Pimpinan PT. Perkebunan NusantaraIV Medan, maka dapat dibuat perjanjian KKB antara PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sebagai pihak kreditur dan mitra binaan sebagai pihak debitur. Setelahperjanjian tersebut selesai dibuat, pihak debitur diharuskan membuka rekening tabungan di Bank Mandiri. Pembukaan rekening tabungan dimaksudkan untuk memudahkan penyaluran dana dari kreditur kepada debitur. Bunga kredit dalam KKB ini adalah sebesar 9 % (sembilan persen).

Setelah dana/pinjaman tersebut disalurkan, maka barulah *credit analyst* melakukan pemantauan kepada debitur setiap enam bulan (walau dalam SOP PKBL ditentukan untuk pemantauan dan pembinaan dilaksanakan setiap setahun sekali). Pemantauan ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kelancaran operasional usaha debitur;
- b. Mengantisipasi kendala-kendala yang timbul dalam usaha debitur;
- c. Meminimalisir risiko kredit menjadi bermasalah;
- d. Melihat apakah peruntukan fasilitas kredit tepat guna dan tepat sasaran.

Pemantauan dari pihak kreditur (PT. Perkebunan Nusantara IV Medan) sekaligus sebagai salah satu bentuk pembinaan kepada debitur/mitra binaan. Salah satu tugas *credit analyst* adalah bertanggung jawab penuh atas usaha debitur sekaligus sebagai konsultan usaha bagi debitur sehingga *credit analyst* harus memantau, membina dan mengawasi usaha debitur dan lunasnya piutang yang dimiliki kreditur (PT. Perkebunan Nusantara IV Medan) dengan tepat waktu. Hasil dari kunjungan dalam rangka pemantauan dan pembinaan ini dituangkan dalam *call memo*. *Call memo* merupakan hasil kerja dari petugas yang melakukan pemantauan dan pembinaan dalam penyaluran PK ini yang isinya dapat berupa tulisan, gambar, peta dan lain-lain terkait keadaan dari usaha mitra binaan.

Apabila ditemukan kredit macet dan bermasalah, maka kredit tersebut ditangani untuk dicari penyelesaiannya yang representasi dari divisi itu di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Tim dari PKBL di PT Perkebunan

Nusantara IV akan melakukan *reschedulling* dan *reconditioning* sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam surat perjanjian pemulihan pinjaman *rescheduling* dan *reconditioning*. PKBL di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan berwenang menangani perihal untuk kredit individual dengan maksimum pinjaman sampai dengan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

### **3. Tahapan Penerapan Program Bina Lingkungan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan di PKBLPT. Perkebunan Nusantara IV Medan, didapat data mengenai tahapan penerapan Program Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Pelaksanaan suatu Program Bina Lingkungan dimulai dari adanya pengajuan usulan Program Bina Lingkungan. Pengajuan tersebut dapat datang dari masyarakat, Pemerintah Daerah setempat atau dari PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sendiri. Pada Program Bina Lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan prosesnya ada yang datang dari pengajuan masyarakat baik perorangan, Pemerintah Daerah, usulan dari PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dan perintah langsung dari PTPN IV Pusat. Usulan Program Bina Lingkungan yang masuk ke PT. Perkebunan Nusantara IV Medan diproses dan dianalisa oleh unit pemasaran yang kemudian usulan tersebut diteruskan kepada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan Kantor Pusat di Jakarta melalui PT. Perkebunan Nusantara IV Medan untuk ditelaah. Unit Pemasaran di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, Unit PKBL memiliki tugas mengurus kredit dan dana di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Setelah proses tersebut PT.

Perkebunan NusantaraIV Medan meneruskan hasil konfirmasi atas usulan Program Bina Lingkungan yang diajukan oleh PT. Perkebunan NusantaraIV Medan lalu menyampaikan kepada pihak bersangkutan. Dalam hal usulan disetujui, maka dana akan disampaikan ke PT. Perkebunan NusantaraIV Medan dan Kantor Cabang menyalurkan dana kepada yang bersangkutan.

Penyaluran tersebut dana kepada yang berkepentingan (masyarakat/lingkungan) dan penyelenggaraan Program Bina Lingkungan tersebut dilaksanakan oleh Unit Pemasaran di PT. Perkebunan NusantaraIV Medan karena Unit PKBL yang paling tepat melaksanakan, hal ini dikarenakan menyangkut perihal *image* dari PT. Perkebunan NusantaraIV Medan sendiri. Setelah Program Bina Lingkungan dilaksanakan, maka dibuat laporannya terkait penyelenggaraan program tersebut dalam jangka waktu satu minggu sampai dengan dua minggu dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang berisi realisasi dana dan berita acara program yang telah diselenggarakan disertai foto-foto pada saat program tersebut. PT. Perkebunan NusantaraIV Medan belum memiliki *dropping* dana rutin dalam penyaluran dana Program Bina Lingkungan, sehingga dalam penerapan penyaluran dana bina lingkungan menjadi kurang leluasa.

#### **4. Sumber Dana Program Kemitraan**

Prosedur penyaluran Program kemitraan pada PTPN IV mengacu pada Permen BUMN. Kesesuaian prosedur Program kemitraan dengan BUMN, Prosedur Program Bina Lingkungan PTPN IV telah mengacu dan sesuai dengan Permen BUMN. Namun PTPN IV seharusnya lebih memperhatikan

penerapan dalam penyaluran PKBLnya, bukan hanya kesesuaian prosedurnya saja.

**Tabel 4.1 Dana Tersedia dan Realisasi Penggunaan PK pada Tingkat Efektifitas**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Sumber Dana</b>						
1	Saldo Awal	1.277.307.302	966.345.837	423.408.869	6.901.185.070	988.802.763
2	Alokasi Laba	-	-	7.523.635.915	-	-
3	Penerimaan Pendapatan	9.818.774.844	8.313.255.752	4.486.583.484	8.873.155.551	10.414.419.357
<b>Jumlah Sumber Dana</b>		<b>11.096.082.146</b>	<b>9.279.601.589</b>	<b>12.433.628.268</b>	<b>15.774.340.621</b>	<b>11.403.222.120</b>
<b>Penggunaan Dana</b>						
1	Penyaluran Kepada Mitra Binaan	7.082.482.950	6.775.000.000	4.975.000.000	14.765.000.000	10.765.000.000
2	Dana Hibah	2.948.561.900	1.239.937.730	108.450.000	-	172.885.443
<b>Jumlah Penggunaan Dana</b>		<b>10.031.044.850</b>	<b>8.014.937.730</b>	<b>5.083.450.000</b>	<b>14.765.000.000</b>	<b>10.937.885.443</b>
<b>Biaya Administrasi</b>						
1	Pengembalian Dana BUMN	-	-	-	-	-
2	Biaya Operasional	98.691.459	841.254.990	448.993.198	-	-
3	Biaya Jasa Administrasi	-	-	-	20.537.858	-
<b>Jumlah Penggunaan Dana &amp; Administrasi</b>		<b>10.129.736.309</b>	<b>8.856.192.720</b>	<b>5.532.443.198</b>	<b>14.785.537.858</b>	<b>10.937.885.443</b>
Saldo Akhir		966.345.837	423.408.869	6.901.185.070	968.802.763	465.336.681
Efektifitas		63,83%	73,01%	40,01%	93,60%	94,40%

Sumber dana program kemitraan berasal dari saldo awal, alokasi laba, penerimaan dari BUMN Pembina, pengembalian pokok pinjaman, jasa administrasi, pendapatan jasa giro dan pendapatanlainnya. Pada awal tahun 2013 saldo awal sebesar Rp. 1.277.307.302 dan menurun di tahun 2014 Rp. 966.345.837 hingga tahun 2015 menjadi Rp. 423.408.869,ditahun 2016 meningkat drastis menjadi Rp. 6.901.185.070 laluditahun 2017 turun lagi menjadi Rp. 988.802.763. Sedangkan untuk alokasi laba hanya dilakukan pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.523.635.915, dan tidak ada alokasi laba pada tahun 2013 dan 2014 maupun di tahun 2016 dan 2017. Sedangkan penerimaan pendapatan yang berasal dari penerimaan dari BUMN Pembina, pengembalian pokok pinjaman, jasa administrasi, pendapatan jasa giro dan pendapatan lainnya pada tahun 2013 sebesar Rp. 9.818.774.844, tahun 2014 sebesar Rp. 8.313.255.752 dan sangat menurun di tahun 2015 sebesar Rp. 4.486.583.484, lalu meningkat di tahun berikutnya tahun 2016 sebesar Rp. 8.873.155.551 dan tahun 2017 sebesar Rp. 10.414.419.357.

Pada tahun 2013 jumlah sumber dana sebesar Rp. 11.096.082.146 kemudian disalurkan untuk program kemitraan sebesar Rp. 10.129.736.309 kepada 3.480 mitra binaan. Penyaluran dana kepada mitra berupa penyaluran dana langsung kepada mitra binaan sebesar Rp. 7.082.482.950, dana hibah Rp. 2.948.561.900 dan biaya operasional sebesar Rp. 98.691.459.

Pada tahun 2014 jumlah sumber dana sebesar Rp. 9.279.601.589 kemudian disalurkan untuk program kemitraan sebesar Rp. 8.856.192.720 kepada 3.437 mitra binaan. Penyaluran dana kepada mitra berupa penyaluran

dana langsung kepada mitra binaan sebesar Rp. 6.775.000.000, dana hibah sebesar Rp. 1.239.937.730 dan biaya operasional Rp. 841.254.990.

Pada tahun 2015 jumlah sumber dana sebesar Rp. 12.433.628.268 kemudian disalurkan untuk program kemitraan sebesar Rp. 5.532.443.198 kepada 3.279 mitra binaan. Penyaluran dana kepada mitra berupa penyaluran dana langsung kepada mitra binaan sebesar Rp. 4.975.000.000, dana hibah sebesar Rp.108.450.000 dan biaya operasional sebesar Rp.448.993.198.

Pada tahun 2016 jumlah sumber dana sebesar Rp. 15.774.340.621 kemudian disalurkan untuk program kemitraan sebesar Rp. 14.785.537.858 kepada 3.279 mitra binaan. Penyaluran dana kepada mitra berupa penyaluran dana langsung kepada mitra binaan sebesar Rp. 14.765.000.000, dan biaya jasa administrasi sebesar Rp20.537.858.

Pada tahun 2017 jumlah sumber dana sebesar Rp. 11.403.222.120 kemudian disalurkan untuk program kemitraan sebesar Rp. 10.937.885.443 kepada 3.422 mitra binaan. Penyaluran dana kepada mitra berupa penyaluran dana langsung kepada mitra binaan sebesar Rp. 10.765.000.000, dan dana hibah sebesar Rp. 172.885.443 biaya operasional sebesar Rp.448.993.198.

Tingkat efektifitas di tahun 2013 adalah 63,83% dan meningkat di tahun 2014 menjadi 73,01%. Sedangkan Tingkat efektifitas program kemitraan pada tahun 2015 adalah yang paling rendah hanya sebesar 40,01%, angka ini tergolong tidak efektif, dimana tingkat dana yang tersedia hanya 40,01% yang digunakan untuk program kemitraan selebihnya hanya kas menganggur. Selanjutnya pada tahun 2016 tingkat efektifitas program kemitraan sangat meningkat sebesar 93,60% dari keseluruhan jumlah dana

yang tersedia sebesar 93,60% disalurkan untuk program kemitraan. Pada tahun 2017 tingkat efektifitas meningkat sebesar 94,40% dari keseluruhan jumlah dana yang tersedia sebesar 94,40% disalurkan untuk program kemitraan. Tingkat efektifitas bisa didapat dari jumlah penyaluran kepada mitra binaan dibagi dengan jumlah sumber dana dan dikalikan dengan 100% (penyaluran kepada mitra binaan / jumlah sumber dana x 100%)

## 5. Tingkat Kolektibilitas Program Kemitraan

Tingkat kesehatan program kemitraan tergantung pada tingkat kolektibilitas mitra binaan PTPN IV.

### a Kolektibilitas Program Kemitraan Tahun 2013

Tingkat kolektibilitas Program Kemitraan pada PTPN IV tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Kolektibilitas Pinjaman					
- Lancar	Rp.	37.909.956.678	100%	Rp.	37.909.956.678
- Kurang Lancar	Rp.	1.839.856.965	75%	Rp.	1.379.892.724
- Ragu-ragu	Rp.	1.759.163.350	25%	Rp.	439.790.838
- Macet	Rp.	13.876.993.102	0%	Rp.	-
<b>Rata-rata Nilai Tertimbang</b>	Rp.	<b>55.385.970.095</b>		Rp.	39.729.640.239

Adapun nilai kolektibilitas Program kemitraan pada tahun 2013 dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kolektibilitas} &= \frac{\text{Rata-rata nilai kolektibilitas}}{\text{Jumlah saldo pinjaman (saldo piutang)}} \times 100\% \\ &= \frac{39.729.640.239}{55.385.970.095} \times 100\% \\ &= 0,7173 \times 100\% \\ &= 71,73\% \end{aligned}$$

Skor = 0

Berdasarkan hasil perhitungan kolektibilitas program kemitraan diperoleh nilai kolektibilitas Program Kemitraan sebesar 71,73% dengan skor 0, artinya tingkat kemampuan pengembalian dana yang disalurkan kepada Mitra PTPN IV Medan sebesar 71,73%.

b Kolektibilitas Program Kemitraan Tahun 2014

Tingkat kolektibilitas Program Kemitraan pada PTPN IV tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Kolektibilitas Pinjaman					
- Lancar	Rp.	38.345.015.455	100%	Rp.	38.345.015.455
- Kurang Lancar	Rp.	1.146.863.052	75%	Rp.	860.147.289
- Ragu-ragu	Rp.	898.533.573	25%	Rp.	224.633.393
- Macet	Rp.	15.540.797.772	0%	Rp.	-
<b>Rata-rata Nilai Tertimbang</b>	Rp.	55.931.209.852		Rp.	39.429.796.137

Adapun nilai kolektibilitas Program kemitraan pada tahun 2014 dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kolektibilitas} &= \frac{\text{Rata-rata nilai kolektibilitas}}{\text{Jumlah saldo pinjaman (saldo piutang)}} \times 100\% \\
 &= \frac{39.429.796.137}{55.931.209.852} \times 100\% \\
 &= 0,7049 \times 100\% \\
 &= 70,49\%
 \end{aligned}$$

Skor = 0

Berdasarkan hasil perhitungan kolektibilitas program kemitraan diperoleh nilai kolektibilitas Program Kemitraan sebesar 70,49% dengan skor 0, artinya kemampuan tingkat pengembalian program kemitraan sebesar 70,49% dari total keseluruhan dana yang disalurkan.

c Kolektibilitas Program Kemitraan Tahun 2015

Tingkat kolektibilitas Program Kemitraan pada PTPN IV tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Kolektibilitas Pinjaman					
- Lancar	Rp.	37.519.146.695	100%	Rp.	37.519.146.695
- Kurang Lancar	Rp.	612.957.213	75%	Rp.	459.717.910
- Ragu-ragu	Rp.	537.328.723	25%	Rp.	134.332.181
- Macet	Rp.	15.635.274.077	0%	Rp.	-
<b>Rata-rata Nilai Tertimbang</b>	<b>Rp.</b>	<b>54.304.706.708</b>		<b>Rp.</b>	<b>38.113.196.786</b>

Adapun nilai kolektibilitas Program kemitraan pada tahun 2015 dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kolektibilitas} &= \frac{\text{Rata-rata nilai kolektibilitas}}{\text{Jumlah saldo pinjaman (saldo piutang)}} \times 100\% \\
 &= \frac{38.113.196.786}{54.304.706.708} \times 100\% \\
 &= 0,7018 \times 100\% \\
 &= 70,18\%
 \end{aligned}$$

Skor = 0

Berdasarkan hasil perhitungan kolektibilitas program kemitraan diperoleh nilai kolektibilitas Program Kemitraan sebesar 70,18% dengan skor 0, artinya kemampuan tingkat pengembalian program kemitraan sebesar 70,18% dari total keseluruhan dana yang disalurkan.

d Kolektibilitas Program Kemitraan Tahun 2016

Tingkat kolektibilitas Program Kemitraan pada PTPN IV tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Kolektibilitas Pinjaman					
- Lancar	Rp.	43.998.308.728	100%	Rp.	43.998.308.728
- Kurang Lancar	Rp.	719.735.806	75%	Rp.	539.801.855
- Ragu-ragu	Rp.	552.739.746	25%	Rp.	138.184.937
- Macet	Rp.	18.436.007.161	0%	Rp.	-
<b>Rata-rata Nilai Tertimbang</b>	Rp.	63.706.791.441		Rp.	44.676.295.519

Adapun nilai kolektibilitas Program kemitraan pada tahun 2016 dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kolektibilitas} &= \frac{\text{Rata-rata nilai kolektibilitas}}{\text{Jumlah saldo pinjaman (saldo piutang)}} \times 100\% \\
 &= \frac{44.676.295.519}{63.706.791.441} \times 100\% \\
 &= 0,7012 \times 100\% \\
 &= 70,12\%
 \end{aligned}$$

Skor = 0

Berdasarkan hasil perhitungan kolektibilitas program kemitraan diperoleh nilai kolektibilitas Program Kemitraan sebesar 63,61% dengan skor 0, artinya kemampuan tingkat pengembalian program kemitraan sebesar 63,61% dari total keseluruhan dana yang disalurkan.

e Kolektibilitas Program Kemitraan Tahun 2017

Tingkat kolektibilitas Program Kemitraan pada PTPN IV tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Kolektibilitas Pinjaman					
- Lancar	Rp.	46.091.485.237	100%	Rp.	46.091.485.237
- Kurang Lancar	Rp.	1.072.476.853	75%	Rp.	804.357.640
- Ragu-ragu	Rp.	480.329.652	25%	Rp.	120.082.413
- Macet	Rp.	19.429.124.065	0%	Rp.	-
<b>Rata-rata Nilai Tertimbang</b>	Rp.	67.073.415.807		Rp.	47.015.925.290

Adapun nilai kolektibilitas Program kemitraan pada tahun 2017 dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kolektibilitas} &= \frac{\text{Rata-rata nilai kolektibilitas}}{\text{Jumlah saldo pinjaman (saldo piutang)}} \times 100\% \\ &= \frac{47.015.925.290}{67.073.415.807} \times 100\% \\ &= 0,7010 \times 100\% \\ &= 70,10\% \end{aligned}$$

Skor = 0

Berdasarkan hasil perhitungan kolektibilitas program kemitraan diperoleh nilai kolektibilitas Program Kemitraan sebesar 70,10% dengan skor 0, artinya kemampuan tingkat pengembalian program kemitraan sebesar 70,10% dari total keseluruhan dana yang disalurkan.

Berdasarkan hasil olahan data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas dan kolektibilitas program PKBL dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.2 Tingkat Efektivitas dan Kolektibilitas Program Kemitraan**

<b>Tahun</b>	<b>Efektivitas</b>	<b>Kolektibilitas</b>
2013	63,83%	71,73%
2014	73,01%	70,49%
2015	40,01%	70,18%
2016	93,60%	70,12%
2017	94,40%	70,10%

Berdasarkan tabel di atas diketahui perbandingan tingkat efektifitas dan kolektibilitas di program kemitraan diketahui tingkat efektifitas tahun 2013 sampai tahun 2014 meningkat. Lalu di tahun 2015 menurun bahkan penurunan sangat drastis, kemudian meningkat lagi di tahun 2016 dan kembali meningkat di tahun 2017. Sedangkan untuk tingkat kolektibilitas

kepercayaannya cenderung stabil setiap tahunnya akan tetapi tetap terjadi penurunan kepercayaan setiap tahunnya.

Tingkat efektifitas dan kolektibilitas penyaluran kredit dipengaruhi oleh prinsip 5C yang belum dilaksanakan dengan optimal khususnya pada capital, character dan collateral. Ketidaksesuaian antara survey dengan kenyataan membuat efektifitas program kemitraan PTPN IV Medan menurun drastis khususnya di tahun 2015.

Persentase perbandingan antara dana kemitraan di tahun 2015 yang disalurkan dan dana yang tersedia hanya sebesar 40,01%

Menurunnya tingkat efektifitas program kemitraan disebabkan banyak faktor beberapa diantaranya adalah jumlah dana perbandingan penggunaan dana dan dana yang tersedia tidak berimbang dengan baik. Tidak tersalurkannya dana yang tersedia disebabkan oleh calon nasabah yang mengajukan pinjaman program kemitraan dinilai tidak memenuhi syarat 5C kredit. Dimana pihak PTPN IV Medan ragu dengan nasabah dan memilih menahan dana yang tersedia untuk tidak disalurkan dan hasilnya kolektibilitas menurun.

Terkait dengan capital yang terkait dengan kondisi kesehatan aset yang dimiliki oleh calon debitur kesehatan aset yang dimaksud adalah kesehatan dan kemampuan usaha yang dimiliki calon debitur untuk mengembalikan pinjaman dengan besar yang telah disepakati. Dalam hal ini tidak sedikit nasabah yang membuat usaha palsu dimana usaha yang dibuat hanya ada ketika survey.

Masalah lainnya dimana karakter mitra yang sulit untuk ditemui dengan berbagai alasan menjadi permasalahan. Mitra yang sering menunda pembayaran menjadi beban bagi PTPN IV Medan yang menjadi beban perusahaan dalam mengumpulkan dana untuk disalurkan lagi.

Sedangkan collateral atau agunan yang diajukan tidak sesuai dengan harga pasar hal ini mengakibatkan tingkat efektivitas kredit menurun dan cenderung berpotensi menjadi kredit macet, tidak hanya itu ada beberapa nasabah yang memiliki agunan yang bermasalah.'

Penilaian atas kelayakan pemberian kredit pada mitra PTPN IV Medan dinilai dengan prinsip 5C dimana sebelum dana disalurkan kepada mitra, pihak PTPN IV Medan akan menilai kelayakan penerimaan dana berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) kepada nasabah untuk menghindari kemacetan dana yang disalurkan. Akan tetapi pada praktiknya pelaksanaan tidak sesuai dengan yang tercatat dan kredit macet tidak dapat dihindari pihak PTPN IV Medan.

Tingkat kolektibilitas macet yang sangat tinggi dari standar kredit macet disebabkan oleh banyaknya dana yang disalurkan tidak sesuai pengembaliannya.

## **6. Bidang Usaha dalam Program Kemitraan**

Adapun bidang yang dilakoni mitra PTPN IV Medan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Sektor Program Kemitraan**

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	Mb	Rp	Mb	Rp	Mb	Rp	Mb	Rp	Mb
1	Industri	715.000.000	24	530.000.000	16	360.000.000	10	725.000.000	17	415.000.000	5
2	Perdagangan	2.584.343.600	104	2.840.000.000	94	2.580.000.000	66	8.075.000.000	183	5.985.000.000	101
3	Pertanian	210.000.000	7	100.000.000	2	205.000.000	6	445.000.000	8	85.000.000	1
4	Perikanan	860.000.000	33	235.000.000	7	170.000.000	5	365.000.000	9	40.000.000	1
5	Peternakan	375.000.000	16	460.000.000	15	315.000.000	9	1.050.000.000	14	630.000.000	9
6	Perkebunan	1.518.139.350	54	1.590.000.000	38	485.000.000	13	1.055.000.000	26	305.000.000	5
7	Jasa	820.000.000	34	1.020.000.000	33	860.000.000	23	3.050.000.000	57	3.305.000.000	43
8	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	172.885.443	-
	<b>Jumlah</b>	7.082.482.950	272	6.775.000.000	205	4.975.000.000	132	14.765.000.000	314	10.937.885.443	165

Berdasarkan hasil table di atas bidang yang dilakoni mitra PTPN IV Medan dominan mitra PTPN IV Medan berasal dari perdagangan disusul dari sektor perkebunan dan sektor lainnya yang saling mendukung. Sektor penyaluran dana program kemitraan dipengaruhi oleh bagaimana sistem yang berlaku dalam penilaian calon mitra binaan.

## **7. Sumber Dana Bina Lingkungan**

Prosedur penyaluran Program Bina Lingkungan pada PTPN IV mengacu pada Permen BUMN. Kesesuaian prosedur Program Bina Lingkungan, Prosedur Program Bina Lingkungan PTPN IV telah mengacu dan sesuai dengan Permen BUMN. Adapun hasil sumber dana dan alokasi program bina lingkungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Dana Tersedia dan Realisasi Penggunaan BL pada Efektifitas**

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Sumber Dana</b>						
1	Saldo Awal	85.073.708	51.101.593	108.310.185	3.453.940.390	544.314.325
2	Alokasi Laba	-		7.523.635.915	-	-
3	Penerimaan Dari Bumh Pembina	13.000.000.000	8.666.895.833	-	2.660.019.150	9.843.014.909
4	Penerimaan Dari Bumh Pembina Lain	-	-	-	2.186.184.901	178.920.676
5	Pendapatan Jasa Giro	19.037.704	12.098.497	15.492.621	28.215.660	4.267.784
6	Pendapatan Lain-Lain	2.255.841.424	572.742.742	917.509.560	7.000.000	-
<b>Jumlah</b>		16.259.952.836	9.302.838.665	8.564.948.281	8.335.360.101	10.570.517.694
<b>Penggunaan Dana</b>						
1	Penyaluran Bina Lingkungan	15.263.607.354	9.045.554.780	5.053.972.287	7.721.975.644	10.550.169.111
2	Dana Hibah	-	-	-	-	-
3	Pengembalian Ke Bumh Lain	-	-	-	-	-
4	Biaya Operasional	940.204.348	145.307.000	53.135.080	62.500.000	-
5	Biaya Administrasi Bank	5.039.541	3.666.700	3.900.524	6.570.132	-
<b>Jumlah</b>		16.208.851.243	9.194.528.480	5.111.007.891	7.791.045.776	10.550.169.111
<b>Saldo Akhir</b>		51.101.593	108.310.185	3.453.940.390	544.314.325	20.348.583
<b>Efektifitas</b>		93,87	97,23	59,01	92,64	99,81

Pada program bina lingkungan yang dilakukan oleh PTPN IV Medan menunjukkan bahwa efektifitas program bina lingkungan yang terjadi sangat efektif. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya program bina lingkungan memiliki tingkat efektifitas yang hampir mencapai 100% .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Program Kemitraan BUMN dan Program Bina Lingkungan yang diterapkan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Medan telah sesuai dengan ketentuan Permeneg PKBL yakni dari kriteria usaha kecil yang menjadi mitra binaan, cara pemberian kredit kepada calon mitra binaan, bentuk penyaluran program kemitraan, besar bunga kredit kemitraan, serta pemantauan dan pembinaan mitra binaan. Ada pun beberapa bentuk penerapan Program Bina Lingkungan yang telah dilakukan oleh di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan adalah:
  - a. Pemberian Beasiswa dan renovasi Gedung Sekolah
  - b. Pembangunan lingkungan melalui distribusi air bersih
  - c. Pembagian Al Qur'an
  - d. Penyerahan hewan Kurban
2. Program kemitraan yang belum efektif selama 2013-2017, hal ini terlihat dari tingkat efektifitas dana yang disalurkan yang berfluktuasi. Terjadi

penurunan tingkat efektifitas pada tahun 2015 yang sangat tajam hingga mencapai nilai 40,01% dari nilai tertinggi sebesar 94,40%.

Di dalam program bina lingkungan, tingkat efektifitas dana yang disalurkan cenderung stabil dan hampir mencapai 100%.

3. Tingkat kolektabilitas kredit program kemitraan yang disebabkan oleh tingkat kredit macet yang bertambah setiap tahunnya menyebabkan pertumbuhan kredit yang berimbang dengan jumlah kredit macet.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sebaiknya memaksimalkan Program Bina Lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya dengan melaksanakan semua bentuk Program Bina Lingkungan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (2) huruf e Permeneg PKBL baik dengan bekerja sama dengan pihak lain atau pun melakukan survey mendalam di lingkungannya, sehingga Program Bina Lingkungan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat dirasakan maksimal manfaatnya oleh masyarakat.
2. PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sebaiknya melakukan survey mendalam sebelum menyalurkan dana, agar Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Survey dapat dilakukan dengan melihat bagaimana kebutuhan wilayah tersebut akan program-program pinjaman usaha kecil dan Bina lingkungan mengingat salah satu tujuan PKBL adalah untuk pemerataan ekonomi.

3. Pentingnya pengawasan pada usaha mitra agar usahanya tetap berjalan dan meminimalkan risiko gagal bayar. Pengawasan dapat dilakukan dengan adanya kegiatan kumpulan rutin khusus mitra dengan memberikan pengarahan dan sharing mengenai kondisi usaha. Tujuannya agar mitra termotivasi dan dapat menemukan solusi ketika terdapat masalah yang terjadi pada usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Astuty, Try. (2015). *Buku Pedoman Umum Belajar Ekonomi*. Jakarta: Vicosta Publishing
- Damara, C., Nikmatullah, D., & Nurmayasari, I. (2015). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) di Kota Bandar Lampung. *JIA*, 3 (3), 315-321.
- Fahmi, Irham dan Yovi Lavianti Hadi. (2010). *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- Hadi, Nor. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hanafie, Rita. (2010). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Harahap, SofyanSyafri, (2011). *Teori Akuntansi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- ISO 26000. (2010). *Guidance on Social Responsibility*
- Jas, Rika Amelia. (2015). Implementasi Kinerja Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara V Pada Usaha Tani Patin Di Kabupaten Kampar. Tesis: InstitutPertanian Bogor.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Padmanisa, Agusti dan Siti Nurwahyuningsih Harahap. (2013). *Analisis Penerapan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan: Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2009-2011*. *Jurnal Akuntansi Universitas Indonesia*, 3 (2), 243-270.
- Peraturan Menteri Negara BUMN, (2007). “Salinan peraturan menteri badan usaha milik negara”
- Peraturan Pemerintah, (2015). “Tentang Program kemitraan dan program bina lingkungan”. (<http://jdih.bumn.go.id/baca/PER-09/MBU/07/2015.pdf>) (2 Februari 2019)
- Permen PKBL, (2007). “Peraturan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara” (<http://jdih.bumn.go.id/baca/PER-05/MBU/2007.pdf>) (3 Februari 2019)
- Prastowo, Joko & Huda, Miftahul. (2011). *Corporate Social Responsibility, Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. Yogyakarta: SamuderaBiru.
- Rivai, Veithzal. (2013). *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Simpson dan John Taylor. (2013). *Corporate Governance, Ethics and CSR*. Great Britain and the United States: Kogan Page Limited

Solihin, Ismail. (2009). *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainable*. Jakarta: Salemba Empat.

Sulistyo, Heru dan ArdianAdiatma. (2011). *Model Optimalisasi Kemitraan UKM (Usaha Kecil Menengah) dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Melalui Program kemitraan Bina lingkungan (PKBL) Untuk Meningkatkan Kinerja UKM*. Jurnal Riptek, 5 (2), 25-40.

Timah.com, (2015). "PT TIMAH berperan aktif mendukung pertumbuhan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat program-kemitraan" <http://www.timah.com/v3/ina/keberlanjutan-program-kemitraan/> (07 Februari 2019)

Undang-undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas

Yulianti, Yoni. (2012). *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNM) Mandiri Perkotaan*. Padang: Universitas Andalas